

Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Towani Tolotang Di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang

Muh Hafizul Hisyam
Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin
Email: MuhHfzlHsym05@gmail.com

Abstract

Community empowerment is one of the essential aspects of improving living standards and promoting socio-economic development in various regions. The Towani Tolotang community possesses significant potential for economic development through community empowerment initiatives, supported by extensive agricultural land and strong local wisdom. However, the implementation of government policies and empowerment programs targeting the Towani Tolotang community remains limited. Therefore, this study aims to examine and analyze the implementation of government policies in empowering the Towani Tolotang community in Amparita Village, Sidenreng Rappang Regency, as well as the factors influencing its implementation. This study employed a qualitative descriptive research method. The research utilized both primary and secondary data sources. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature review. The findings indicate that the implementation of government policies for the empowerment of the Towani Tolotang community in Amparita Village, Sidenreng Rappang Regency, has been carried out through the application of community empowerment principles, namely equality, participation, self-reliance, and sustainability. Overall, the implementation has been relatively successful; however, further improvement is still needed, particularly regarding the sustainability principle in empowering the Towani Tolotang community.

Keywords: *Towani Tolotang; Community Empowerment; Community Empowerment Principles; Amparita Village.*

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan taraf hidup dan pembangunan sosial-ekonomi di berbagai wilayah, pada masyarakat Tolotang terdapat potensi besar dalam upaya peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan Masyarakat. Didukung dengan lahan pertanian yang luas dan kearifan lokal, namun pada pelaksanaan masih kurang kebijakan maupun program pemberdayaan terhadap Masyarakat Tolotang. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Towani Tolotang Kelurahan Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Towani Tolotang Kelurahan Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang menggunakan penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan Masyarakat, yang terdiri dari Kesetaraan, partisipatif, ksewadayaan, dan Keberlanjutani, telah berjalan dengan cukup baik akan tetapi masih perlu untuk ditingkatkan terutama pada prinsip keberlanjutan dalam pemberdayaan Masyarakat towani Tolotang.

Kata kunci: *Towani Tolotang, Pemberdayaan Masyarakat, Prinsip Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan Amparita*

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu mengenali potensi, mengambil keputusan, mengelola sumber daya, dan meningkatkan kesejahteraannya secara lebih mandiri. Pendekatan pemberdayaan yang berbasis potensi lokal menempatkan sumber daya ekonomi, sosial, budaya, dan kelembagaan setempat sebagai modal pembangunan (Rachman et al., 2022). Dalam konteks kebijakan pemerintah daerah, pemberdayaan perlu diarahkan tidak hanya pada pemberian bantuan, tetapi pada peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dan mempertahankan manfaat program secara berkelanjutan. Peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah, kelurahan, dan pemberdayaan masyarakat tetap menjadi dasar normatif bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi tersebut.

Pemberdayaan pada dasarnya memerlukan keterlibatan masyarakat dalam merencanakan, memutuskan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan yang berkaitan dengan kehidupannya. Penelitian mengenai pemberdayaan berbasis potensi lokal menunjukkan bahwa keberhasilan program dipengaruhi oleh kemampuan mengembangkan kapasitas, kelembagaan, jejaring, dan pemanfaatan sumber daya setempat (Rachman et al., 2022). Karena itu, pemberdayaan tidak cukup dipahami sebagai program jangka pendek, tetapi sebagai proses membangun kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan sering ditempatkan sebagai strategi untuk mengatasi kemiskinan, keterbatasan akses, ketimpangan, lemahnya kelembagaan, dan rendahnya kemandirian masyarakat. Namun, pelaksanaannya tidak selalu menghasilkan perubahan yang berkelanjutan. Pengalaman pemberdayaan ekonomi masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi, kapasitas sumber daya manusia,

dukungan modal, dan pengelolaan kegiatan merupakan unsur yang berpengaruh terhadap kesejahteraan dan kemandirian masyarakat (Surya et al., 2020a).

Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat menghadapi tantangan berupa keterbatasan keterampilan, akses informasi, ketimpangan ekonomi, dan rendahnya kemampuan mengembangkan potensi lokal. Pada masyarakat yang memiliki identitas adat atau kepercayaan lokal, program juga perlu sensitif terhadap nilai, struktur sosial, dan kearifan setempat. Kearifan lokal dapat menjadi sumber kekuatan sosial untuk mempertahankan hak, identitas, dan keberlanjutan komunitas apabila diintegrasikan ke dalam kebijakan secara inklusif (Kambo, 2021). Persoalan lain yang penting adalah keberlanjutan program; pemberdayaan yang berhenti setelah bantuan atau pelatihan selesai berisiko tidak menghasilkan kemandirian jangka panjang.

Berdasarkan kebutuhan analisis penelitian, empat prinsip digunakan untuk membaca proses pemberdayaan, yaitu kesetaraan, partisipasi, keswadayaan/kemandirian, dan keberlanjutan. Keempat prinsip tersebut dipertahankan sebagai kerangka analisis empiris penelitian. Literatur mutakhir menunjukkan bahwa partisipasi tidak otomatis menghasilkan pemberdayaan apabila masyarakat tidak memiliki kapasitas dan ruang pengaruh yang memadai; sebaliknya, pemberdayaan dan partisipasi berkembang melalui proses yang saling memperkuat (Prasetyo & Firdauzi, 2023). Keberlanjutan juga memerlukan kemampuan masyarakat dan kelembagaan untuk memonitor, mengevaluasi, dan mempertahankan hasil program (Khair et al., 2020).

Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, agama, dan kepercayaan lokal. Towani Tolotang merupakan salah satu komunitas kepercayaan lokal yang berpusat di Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe,

Kabupaten Sidenreng Rappang. Kajian mengenai komunitas agama lokal di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa hubungan antara komunitas Towani Tolotang dan pemerintah berlangsung dalam dinamika sosial, ekonomi, politik, dan pengakuan identitas yang terus berkembang (Damirah et al., 2023). Tradisi dan praktik simbolik Towani Tolotang juga menjadi bagian penting dari identitas komunitas yang diwariskan antargenerasi (Sitoto & Akkas, 2021).

Dalam konteks pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat Towani Tolotang dapat diarahkan pada peningkatan kesejahteraan ekonomi sekaligus penghormatan terhadap identitas dan kearifan lokal. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mengenai penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu dasar kebijakan bagi pengembangan usaha, pertanian, peternakan, industri kecil, dan kerajinan. Pengalaman pemberdayaan masyarakat adat di daerah lain menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat menjadi basis pengelolaan sumber daya sekaligus memperkuat kapasitas komunitas (Awaliyah et al., 2020).

Kelurahan Amparita berada dalam Kabupaten Sidenreng Rappang yang memiliki basis ekonomi pertanian. Potensi lahan, aktivitas perdagangan, UMKM, serta daya tarik budaya Towani Tolotang merupakan sumber daya yang dapat dikembangkan melalui pemberdayaan. Pemberdayaan ekonomi yang mengintegrasikan potensi lokal dan nilai budaya dapat memperluas peluang usaha sekaligus mendukung pelestarian identitas komunitas (Sopanah et al., 2021). Modal sosial juga penting karena dapat memperkuat hubungan antara pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Sarjiyanto, 2022).

Meskipun memiliki potensi tersebut, masyarakat Towani Tolotang menghadapi sejumlah hambatan pemberdayaan. Berdasarkan dokumen Renstra Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidenreng Rappang 2019-2023 yang digunakan dalam penelitian, belum terdapat program peningkatan ekonomi yang secara khusus ditujukan kepada masyarakat Towani Tolotang. Kondisi ini perlu dibaca secara hati-hati: kesetaraan tidak selalu berarti program harus dibedakan berdasarkan identitas, tetapi kebijakan perlu memastikan bahwa kebutuhan, hambatan, dan potensi komunitas benar-benar terakomodasi. Pemberdayaan berbasis kearifan lokal di daerah lain menunjukkan pentingnya penyesuaian desain kebijakan terhadap konteks komunitas (Lumbantobing & Sihombing, 2022).

Renstra tersebut juga mencatat tantangan berupa keterbatasan akses informasi, infrastruktur, anggaran, rendahnya kesadaran terhadap potensi, serta lemahnya tindak lanjut. Persoalan tersebut menegaskan pentingnya perencanaan yang tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan, tetapi memperhitungkan kesinambungan manfaat. Pengalaman pembangunan berbasis masyarakat menunjukkan bahwa penguatan gotong royong, kepemimpinan lokal, dan kolaborasi multipihak dapat meningkatkan daya lenting komunitas ketika dukungan pemerintah terbatas (Humaedi et al., 2021).

Oleh sebab itu, timbul keinginan penulis untuk menganalisa permasalahan pemberdayaan masyarakat yang dituangkan dalam judul “Implementasi Kebijakan Pemerintahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Towani Tolotang di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang”. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi Towani Tolotang di Kelurahan Amparita, Kabupaten Sidrap?. Adapun tujuan Peneliti

ini yaitu, untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi Towani Tolotang di Kelurahan Amparita, Kabupaten Sidrap. Serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Towani Tolotang di Kelurahan Amparita, Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian dilaksanakan melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen, laporan, arsip, dan literatur yang relevan.

Data dianalisis secara kualitatif sejak proses pengumpulan data berlangsung. Informasi hasil wawancara, observasi, dan dokumen diorganisasi, dipilih sesuai fokus penelitian, kemudian diinterpretasikan untuk menjelaskan penerapan prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan/kemandirian, dan keberlanjutan. Proses tersebut menghasilkan catatan lapangan dan tema-tema yang digunakan dalam penyusunan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Towani Tolotang dianalisis melalui empat prinsip yang digunakan dalam penelitian, yaitu kesetaraan, partisipasi, keswadayaan/kemandirian, dan keberlanjutan. Keempatnya membantu melihat apakah program memberi akses yang adil, membuka ruang keterlibatan masyarakat, memperkuat kemampuan mandiri, dan mampu mempertahankan manfaat dalam jangka panjang.

Prinsip Kesetaraan

Prinsip kesetaraan adalah pilar penting dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Amparita, yang terdiri dari dua kelompok utama: masyarakat Muslim dan masyarakat adat Towani Tolotang. Pemerintah setempat, seperti yang diungkapkan oleh kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sidrap, Bapak AA, dan kepala Kelurahan Amparita, Ibu JM, berkomitmen untuk menerapkan kebijakan yang adil dan inklusif. Semua program pemberdayaan dirancang untuk memberikan akses yang setara kepada seluruh warga, tanpa diskriminasi. Bukti nyata dari penerapan prinsip ini adalah program menjahit yang diikuti oleh ibu-ibu dari kedua kelompok, serta berbagai kegiatan lain yang tercantum dalam RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sidrap, seperti pelatihan teknologi tepat guna, pembinaan lembaga adat, dan pelatihan keterampilan. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan universal dapat mendukung kesetaraan apabila seluruh kelompok benar-benar memperoleh akses yang sama. Dalam konteks masyarakat adat, kesetaraan juga perlu disertai pengakuan terhadap identitas dan kearifan lokal sebagai sumber daya sosial komunitas (Kambo, 2021).

Penerapan prinsip kesetaraan ini tercermin dalam data RENSTRA DPM Kabupaten Sidrap Tahun 2019-2023, yang menunjukkan bahwa tidak ada program khusus untuk masyarakat Towani Tolotang atau kelompok lainnya. Program seperti peningkatan pengembangan ekonomi perdesaan, pembinaan dan fasilitasi Bumdes, dan pelatihan keterampilan tersedia bagi semua masyarakat tanpa memandang latar belakang agama atau budaya. Hasilnya, penerapan prinsip kesetaraan ini telah meningkatkan rasa kebersamaan dan saling menghargai antar kelompok masyarakat di Amparita, menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung pembangunan

berkelanjutan. Distribusi sumber daya yang merata dan akses yang setara terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan telah mengurangi potensi konflik dan memperkuat kohesi sosial, menjadikan prinsip kesetaraan sebagai fondasi yang kokoh untuk masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat di Kelurahan Amparita. Kesetaraan akses tersebut perlu terus dipantau agar program yang secara formal terbuka bagi semua warga tidak menimbulkan hambatan tersembunyi bagi kelompok tertentu. Pengalaman komunitas lokal menunjukkan bahwa penghormatan terhadap nilai budaya dapat memperkuat kohesi sosial dan kapasitas masyarakat (Muslim, 2020).

Prinsip Partisipatif

Prinsip partisipatif memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Amparita, dengan masyarakat Towani Tolotang menunjukkan keterlibatan yang sangat aktif dalam berbagai program. Partisipasi mereka didorong oleh kebijakan inklusif serta nilai-nilai budaya seperti kebersamaan dan gotong royong. Kepala Kelurahan Amparita, mengapresiasi antusiasme ini, menekankan bahwa partisipasi aktif dari masyarakat Towani Tolotang dalam kegiatan adat dan program pemberdayaan lainnya menunjukkan tanggung jawab mereka terhadap kemajuan komunitas. Pernyataan ini diperkuat oleh ketua adat Towani Tolotang, Uwa' WS, yang menyoroti peran penting nilai kebersamaan dan gotong royong dalam memastikan kelancaran pelaksanaan program serta mempererat hubungan sosial di antara masyarakat. Partisipasi yang bertumpu pada kebersamaan dan gotong royong merupakan modal sosial penting dalam pemberdayaan. Kajian di Indonesia menunjukkan bahwa gotong royong dan kepemimpinan lokal dapat memperkuat kemampuan masyarakat menghadapi persoalan bersama (Humaedi et al., 2021).

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat Towani Tolotang dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan membuat program tersebut lebih efektif dan berkelanjutan. Keterlibatan aktif ini menciptakan rasa memiliki di kalangan masyarakat, menunjukkan bahwa prinsip partisipatif yang berakar pada nilai-nilai kebudayaan lokal adalah kekuatan pendorong signifikan dalam pemberdayaan komunitas. Sebagai bukti nyata, pada kegiatan adat seperti mappatettong bola, masyarakat, baik Muslim maupun Towani Tolotang, bekerja sama dan saling membantu. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan hasil program tetapi juga mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kelurahan Amparita. Namun, tingginya kehadiran masyarakat belum selalu identik dengan pengaruh dalam pengambilan keputusan. Partisipasi yang bermakna memerlukan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan, memengaruhi pilihan program, dan terlibat dalam evaluasi (Tambaip et al., 2023).

Prinsip Keswadayaan

Prinsip keswadayaan atau kemandirian di Kelurahan Amparita menekankan pada penguatan kapasitas masyarakat untuk mengembangkan potensi mereka secara berkelanjutan. Masyarakat Amparita, terutama Towani Tolotang, menunjukkan tingkat Kemandirian dalam pemberdayaan berarti meningkatnya kemampuan masyarakat mengelola sumber daya dan peluang ekonomi tanpa ketergantungan terus-menerus pada bantuan. Penguatan kapasitas, partisipasi, dan pengelolaan usaha terbukti berhubungan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Surya et al., 2020b).

kemandirian yang baik dalam berbagai bidang seperti pertanian dan perdagangan. Dukungan dari pemerintah, seperti penyediaan bibit unggul, pelatihan teknis, dan akses ke pasar, sangat membantu dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil

pertanian. Lahan pertanian yang luas, sebesar 288,21 Ha dari total 393,2 Ha, menjadi bukti nyata potensi besar di bidang ini. Selain itu, keterampilan dan jaringan masyarakat dimanfaatkan untuk mengembangkan UMKM, dengan bantuan pemerintah berupa pelatihan kewirausahaan, akses modal, dan fasilitasi pemasaran di pasar utama Kecamatan Tellu Limpoe.

Nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal juga memainkan peran penting dalam mengembangkan kemandirian masyarakat Amparita. Tradisi seperti kegiatan tahunan parinyameng mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemerintah bekerja sama dengan tokoh adat dan masyarakat lokal untuk melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal melalui berbagai program pelestarian budaya dan festival. Dukungan pemerintah dan semangat kemandirian yang tinggi di kalangan masyarakat menjadikan program pemberdayaan di Amparita lebih efektif dan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan individu dan memperkuat solidaritas sosial. Prinsip kemandirian yang diterapkan menunjukkan bahwa dengan dukungan yang tepat, masyarakat dapat mengoptimalkan potensi mereka dan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan. Kearifan lokal dapat berfungsi sebagai modal budaya sekaligus ekonomi apabila pengembangannya tidak menghilangkan makna dan kontrol komunitas terhadap tradisinya. Pengembangan desa berbasis kearifan lokal menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi dapat berjalan bersama dengan pelestarian identitas apabila masyarakat menjadi aktor utama (Nugroho & Triyono, 2022; Sulaiman et al., 2022).

Prinsip Keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan dalam program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Amparita menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan dana dan kurangnya program yang berkelanjutan. Kepala

Kelurahan Amparita, JM, mengakui bahwa banyak program yang dimulai dengan antusiasme tinggi namun terhenti karena dana yang tidak mencukupi. Berbeda dengan desa yang memiliki dana desa, Kelurahan Amparita sering kali kekurangan anggaran untuk menjalankan program jangka panjang. Selain itu, jumlah dan variasi program pemberdayaan yang diadakan oleh pemerintah masih kurang, tidak mencakup semua kebutuhan dan potensi yang ada di masyarakat. WD, seorang warga Towani Tolotang, juga menyoroti bahwa banyak program bagus yang akhirnya terhenti karena dana yang tidak mencukupi dan kurangnya inisiatif yang mencakup berbagai kebutuhan masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan merupakan dimensi paling lemah dalam pemberdayaan di Amparita. Program yang bergantung pada anggaran pemerintah dan tidak memiliki skema tindak lanjut berisiko berhenti setelah kegiatan selesai. Pendekatan pemberdayaan berkelanjutan membutuhkan mekanisme pemantauan, kapasitas lokal, dan kemampuan mempertahankan hasil program (Khair et al., 2020).

Kurangnya perencanaan jangka panjang dan keterbatasan kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah juga mempengaruhi keberlanjutan program pemberdayaan di Amparita. Banyak program dirancang untuk hasil cepat tanpa mempertimbangkan cara mempertahankan hasil tersebut dalam jangka panjang. Dukungan dari pihak swasta dan lembaga non-pemerintah sangat penting untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat, memungkinkan program untuk terus berjalan dan berkembang. Kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat membantu mengatasi hambatan ini dan memastikan program-program pemberdayaan di Kelurahan Amparita menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Dukungan tambahan, pelatihan, dan bantuan

teknis dapat memperkuat kemampuan masyarakat dalam menjalankan dan mengembangkan program-program tersebut, menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Amparita. Karena itu, kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga nonpemerintah, perguruan tinggi, dan kelompok masyarakat dapat menjadi alternatif untuk memperluas sumber daya dan pendampingan. Penguatan modal sosial dan kelembagaan ekonomi juga dapat membantu masyarakat mempertahankan manfaat pemberdayaan dalam jangka panjang (Yuliarmi et al., 2020). Pada saat yang sama, pengembangan masyarakat berbasis sumber daya lokal perlu tetap menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dan keberlanjutan sosial-lingkungan (Surya et al., 2020b).

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Towani Tolotang di Kelurahan Amparita, Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan melalui penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yang meliputi prinsip kesetaraan, partisipatif, keswadayaan (kemandirian), dan keberlanjutan.

Pada prinsip kesetaraan, pemerintah telah berupaya memberikan kesempatan dan akses yang sama kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama, budaya, maupun kelompok sosial. Berbagai program pemberdayaan yang dilaksanakan bersifat inklusif dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, baik masyarakat Muslim maupun masyarakat adat Towani Tolotang. Penerapan prinsip ini telah menciptakan hubungan sosial yang harmonis, memperkuat rasa kebersamaan, serta mendorong terciptanya lingkungan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Kesetaraan tersebut perlu terus dievaluasi secara substantif agar akses yang sama juga berarti

kemampuan yang sama untuk memperoleh manfaat program.

Pada prinsip partisipatif, masyarakat Towani Tolotang menunjukkan tingkat keterlibatan yang tinggi dalam berbagai kegiatan pemberdayaan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan program pemberdayaan menunjukkan adanya rasa memiliki terhadap program yang dijalankan. Nilai-nilai budaya seperti gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan menjadi modal sosial yang memperkuat keberhasilan implementasi program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Amparita. Modal sosial berupa gotong royong dan solidaritas menjadi kekuatan utama, tetapi partisipasi perlu terus ditingkatkan dari keterlibatan kegiatan menuju keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan evaluasi program (Prasetyo & Firdausi, 2023).

Pada prinsip keswadayaan atau kemandirian, masyarakat Towani Tolotang telah mampu mengembangkan potensi yang dimiliki, khususnya pada sektor pertanian, perdagangan, dan usaha ekonomi masyarakat. Dukungan pemerintah melalui pelatihan, penyediaan sarana produksi, akses permodalan, serta pengembangan keterampilan telah mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Selain itu, pemanfaatan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal turut menjadi faktor penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial masyarakat. Penguatan kemandirian sebaiknya diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha, jejaring pasar, kelembagaan ekonomi, dan kemampuan masyarakat mengembangkan sumber daya lokal secara mandiri. Pengalaman masyarakat adat lain juga menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya yang bertumpu pada pengetahuan lokal dapat memperkuat

keberlanjutan mata pencaharian (Murhaini & Achmadi, 2021).

Namun demikian, pada prinsip keberlanjutan masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan program pemberdayaan belum berjalan secara optimal dan berkesinambungan. Keterbatasan anggaran, minimnya program jangka panjang, kurangnya kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah, serta belum optimalnya perencanaan keberlanjutan program menjadi tantangan utama yang dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga terkait untuk menjamin keberlangsungan program pemberdayaan sehingga manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat Towani Tolotang dan masyarakat Kelurahan Amparita secara umum. Dengan demikian, rekomendasi utama penelitian adalah menyusun skema pemberdayaan jangka menengah yang memiliki pendampingan, indikator keberlanjutan, sumber pembiayaan yang lebih beragam, dan kemitraan multipihak. Perlindungan identitas serta kebebasan komunitas Towani Tolotang juga perlu tetap menjadi bagian dari pendekatan pembangunan yang inklusif (Yunazwardi & Nabila, 2021)

DAFTAR PUSTAKA

- Rachman, D. R. N., Roziqin, A., & Salahudin. (2022). Community empowerment based on local potential: A systematic literature review. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 20(1), 299–316. <https://doi.org/10.30996/dia.v20i01.6472>
- Surya, B., Saleh, H., Suriani, S., Sakti, H. H., Hadijah, H., & Idris, M. (2020). Management of slum-based urban farming and economic empowerment of the community of Makassar City, South Sulawesi, Indonesia. *Sustainability*, 12(18), 7324. <https://doi.org/10.3390/su12187324>
- Kambo, G. A. (2021). Local wisdom Pasang ri Kajang as a political power in maintaining indigenous people's rights. *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*, 6(2), 265–280. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v6i2.10585>
- Prasetyo, A. S., & Firdauzi, A. (2023). Determinants of farmer's participation in implementation community empowerment: A case study of thematic village in Indonesia. *HABITAT*, 34(2), 178–189. <https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2023.034.2.16>
- Khair, N. K. M., Lee, K. E., & Mokhtar, M. (2020). Sustainable city and community empowerment through the implementation of community-based monitoring: A conceptual approach. *Sustainability*, 12(22), 9583. <https://doi.org/10.3390/su12229583>
- Damirah, Darwis, Hamid, A., & Musmulyadi. (2023). Internalisasi konsep cycle relation model pada komunitas agama lokal di Indonesia: Perspektif sosial, ekonomi dan politik pada kepercayaan Towani Tolotang, Aluk Todolo, dan Ammatoa di Sulawesi Selatan. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 24(3). <https://doi.org/10.55981/jmb.2022.1486>
- Sitoto, S., & Akkas, A. (2021). Symbolic meanings in the ritual speech of Pattomateang ceremony of Towani Tolotang community in Amparita Village, Sidrap Regency, South Sulawesi: An anthropolinguistic study. *Proceedings of KIMLI 2021*, 163–169. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211226.033>
- Awaliyah, N. R., Hasriyanti, & Maddatuang. (2020). Kearifan lokal Paseng Ri Ade' dan pemberdayaan masyarakat adat

- Karampuang dalam upaya pelestarian hutan. *LaGeografia*, 18(3). <https://doi.org/10.35580/lageografia.v18i3.11901>
- Sopannah, A., Bahri, S., & Ghozali, M. (2021). Community empowerment in Batu Tourism City through local wisdom-based creative economics. *Proceedings of ICONS 2020*. <https://doi.org/10.4108/eai.30-11-2020.2303720>
- Sarjiyanto. (2022). Moderating effect of social capital on community empowerment and economic well-being. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 9(6). <https://doi.org/10.22437/ppd.v9i6.15325>
- Lumbantobing, H. B., & Sihombing, T. (2022). Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat berbasis local wisdom dalam kegiatan pariwisata di Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan Kabupaten Samosir. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 9(2). <https://doi.org/10.37676/professional.v9i2.3320>
- Humaedi, M. A., Purwaningsih, S. S., Sundari, L. V., & Fathy, R. (2021). Building mutual cooperation and activate the role of local leadership: Pentahelix's strategy for handling the impact of COVID-19. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 23(1). <https://doi.org/10.14203/jmb.v23i1.1203>
- Muslim, A. (2020). Islam Nusantara: A study on the effect of local wisdom value on customary community's piety in Kampung Naga. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 5(2), 159–186. <https://doi.org/10.22515/islimus.v5i2.2348>
- Tambaip, B., Moento, P. A., & Tjilen, A. P. (2023). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 12(1), 121–128. <https://doi.org/10.35724/sjias.v12i1.5096>
- Surya, B., Ahmad, D. N. A., Sakti, H. H., & Sahban, H. (2020). Natural resource conservation based on community economic empowerment: Perspectives on watershed management and slum settlements in Makassar City, South Sulawesi, Indonesia. *Land*, 9(4), 104. <https://doi.org/10.3390/land9040104>
- Nugroho, D. Y., & Triyono, J. (2022). Development tourism village of Conto Village based on local wisdom and community empowerment. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 8(4), 1521–1528. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i4.1035>
- Sulaiman, A. I., Chusmeru, Adi, T. N., & Runtiko, A. G. (2022). Community empowerment as socio-economic education of tourism villages based on local wisdom. *Education Quarterly Reviews*, 5(3), 54–67. <https://doi.org/10.31014/aior.1993.05.03.524>
- Yuliarmi, N. N., Dunggio, M., Yasa, I. N. M., & Wright, L. T. (2020). Improving public welfare through strengthening social capital and cooperative empowerment. *Cogent Business & Management*, 7(1), 1841075. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1841075>
- Yunazwardi, M. I., & Nabila, A. (2021). Implementasi norma internasional mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. *Indonesian Perspective*, 6(1), 1–21.

<https://doi.org/10.14710/ip.v6i1.37510>

Murhaini, S., & Achmadi. (2021). The farming management of Dayak People's community based on local wisdom ecosystem in Kalimantan Indonesia. *Heliyon*, 7(12), e08578. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08578>